

LAPORAN PELAKSANAAN
PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana, seperti gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, letusan gunung api, gelombang pasang dan bencana lainnya. Sebagai upaya untuk mewujudkan Sumatera Barat yang aman dalam pembangunan disegala bidang, Pemerintah Sumatera Barat selalu melakukan tindakan pengurangan risiko bencana sebagai tanggapan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana diantaranya dalam penyusunan kebijakan dan rencana aksi dalam penanggulangan bencana.

Sebagai bahan dasar dalam membuat dan menetapkan kebijakan tersebut diperlukan data dan informasi kebencanaan yang selalu disusun dalam bentuk database kebencanaan yang merekam waktu, lokasi, tempat, dan dampak secara keseluruhan, sehingga dapat diketahui kecenderungan kejadian bencana, volume kejadian, eskalasi atau penurunan dan analisa – analisa lanjutannya. Tidak hanya dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. Data dan Informasi Kebencanaan ini juga dapat dipergunakan di berbagai sektor, pengamatan dampak dan kaitannya dengan iklim dan cuaca, pengembangan pertanian dan tentu saja pembangunan infrastruktur.

B. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

- a. Terbentuknya kesepakatan bersama tentang Dokumen Data dan Informasi Kebencanaan.
- b. Disepakatinya format data dan sistematika dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang seragam sebagai produk tahunan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Adanya standarisasi kemampuan individu pengelola dan pengolah data dan informasi kebencanaan di seluruh Sumatera Barat.
- d. Terlaksananya kegiatan Pengumpulan, Pengelola dan Analisa Data dan Informasi Kebencanaan Sumatera Barat tahun 2018.
- e. Terlaksananya pertemuan dalam rangka pembekalan operator pengelola data dan informasi kebencanaan.
- f. Tersedianya data dan Informasi Kebencanaan

g. Tersedianya tenaga operator pengelola Data dan Informasi Kebencanaan Provinsi Sumatera Barat.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah aparatatur pemerintahan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pengelola dan pengolah data dan Informasi Kebencanaan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan di tetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penangulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) menjadi Badan Koordinasi Penanganan Bencana (Bakornas PB);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
7. Perka BNPB No. 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan.
- 8.
9. Keputusan Mendagri RI No.131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 tahun 2002 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Sumatera Barat;

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang perjalanan dinas dilindungi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
14. RPB Provinsi Sumatera Barat No.13/2012
15. Program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

E. Pendanaan

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan ini dibebankan kepada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2018

F. Bentuk Kegiatan

- a. Pengumpulan, Pengolahan dan analisis data dan informasi kebencanaan.
- b. Pertemuan dalam rangka pembekalan untuk pengelola dan dan informasi kebencanaan

II. REALIASI PELAKSANAAN

A. Bentuk Kegiatan

- a. Pertemuan/Rapat Koordinasi Data dan Informasi Bencana Sumatera Barat

1. Narasumber

- | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Sumbar | Eselon II | : 1 orang |
| 2. Pejabat BPBD Prov. Sumatera Barat | Eselon III | : 1 orang |
| 3. Pejabat BPBD Prov. Sumatera Barat | Eselon IV | : 1 orang |
| 4. Tim Instruktur/fasilitator Lokal | | 3 orang |

2. Waktu dan Tempat

- Hari : Rabu s/d Jumat
 Tanggal : 25 s/d 27 Juli 2018
 Tempat : Hotel Hayam Wuruk Padang

3. Peserta

Kegiatan pertemuan/rapat koordinasi diarahkan untuk pembekalan tenaga pengelola data dan informasi kebencanaan yang berasal dari BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan

jumlah peserta 55 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pemaparan materi ruang dan workshop.

No	Unsur Peserta/Sasaran	Jumlah Peserta		Nama Peserta
		Undangan	Realisasi	
1	BPBD Kabupaten 50 Kota	3	3	Novri Elvita
				Ronny M. Nur
				Putra Satria Pratama.
2	BPBD Kabupaten Agam	3	3	Yunaidi
				LUKMAN SYAHPUTRA
				Putri Handayani
3	BPBD Kabupaten Dharmasraya	3	2	Haryanto
				Ardianis Efendi
4	BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai	3	3	Novalia
				Flaxeng Candra
				Sarman Simanjuntak
5	BPBD Kabupaten Padang Pariaman	3	3	Andri Liska Putra, Amd.
				Jeri irmansyah
				Syafriadi
6	BPBD Kabupaten Pasaman	3	3	Yose Putra. SH.
				Yuliarfis
				Yasrul
7	BPBD Kabupaten Pasaman Barat	3	3	H Setrman
				Jon Hardi
				Yeni Hariyanti
8	BPBD Kabupaten Pesisir Selatan	3	3	Yef Indra, SH,. MM.
				Hardayanti, SH
				S. Marpaung

9	BPBD Kabupaten Sijunjung	3	3	Arif Budiman, SE
				Syafaruddin. A, S.ST
				Diki Adrianto, S.Kom
10	BPBD Kabupaten Solok	3	3	Nofriadi
				Zulkamra
				Tengku Renol
11	BPBD Kabupaten Solok Selatan	3	3	Zoni Syahputra
				Harmaini Said
				Adrian Sance
12	BPBD Kabupaten Tanah Datar	3	3	Fauzan
				Yusridas Hendra
				Nurmatias
13	BPBD Kota Bukittinggi	2	2	Putri Adelin
				Haryo Tri Saputra
14	BPBD Kota Padang	2	2	Rifqi Arif, SH
				Fredico Orlando
15	BPBD Kota Padang Panjang	2	2	Eka P. Gunawan
				Eko Rahman Zuryadi
16	BPBD Kota Pariaman	2	2	Dendi Pribadi
				Juprianto
17	BPBD Kota Payakumbuh	2	2	Hidayatur Rusyda
				Alexandra
18	BPBD Kota Sawahlunto	2	2	Lonina
				Doni Ikhsan
19	BPBD Kota Solok	2	2	Agus Susanto, SH
				Hellin Chartanova
20	BPBD Provinsi	4	2	Eva Tresna
				Surung Martua Sinaga

21	Pusdalops PB BPBD Prov	4	4	Mediaris Djorghi
				Yodi Yuriza, S.Kom.'
				Amriansyah
				Muharrindo
JUMLAH		58	55	

b. Penyusunan Buku Data dan Informasi Kebencanaan

Kegiatan Penyusunan Buku data dan Informasi Kebencanaan Sumatera Barat dilakukan pasca Workshop/Rakor Penyusunan Data dan Informasi Bencana Sumatera Barat, dilaksanakan pada akhir tahun 2018 atau awal tahun 2018 dengan terkumpulnya Data dan Informasi Bencana dari Kabupaten/Kota periode tahun 2018 dengan metode

1. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan langsung ke Kabupaten/Kota
2. Pengumpulan data dan informasi dari BPBD Kabupaten/Kota melalui laporan resmi terkompilasi

G. Pendanaan

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Kegiatan "Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan" dibebankan pada APBD BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, Nomor Rekening 5.00.01.02.160.0003.

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.388.200		
2	Belanja Seminar Kit	2.900.000		
3	Belanja Spanduk	600.000		
4	Belanja Jasa Akomodasi	46.200.000		
5	Belanja Cetak Kokarde dan Sertifikat	1.160.000		
6	Belanja Penggandaan	750.000		
7	Belanja Honor Narasumber	3.500.000		
8	Belanja Honor Instruktur	2.550.000		

	/Fasilitator			
9	Belanja Honor Moderator	1.500.000		
10	Belanja Honor Pembawa Acara	150.000		
11	Belanja Honor Pembaca Doa	150.000		
TOTAL				

H. Hasil yang dicapai

- a. Tersosialisasikannya standar data kebencanaan di seluruh Sumatera Barat
- b. Tersusunnya Buku Data dan Informasi Kebenncanaan Sumatera Barat.

III. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. Permasalahan

- a. BPBD Kabupaten/Kota belum konsisten mengumpulkan dan mengirimkan data
- b. Data yng dikirimkan BPBD Kabupaten/Kota belum terstandarisasi, format belum seragam.

B. Solusi

- a. BPBD Kabupaten/Kota tetap mengirimkan Data dan Informasi ke pengelola data dan Informasi di BPBD Provinsi dengan format table.
- b. Format pengumpulan data dan petunjuk teknis disusun dan dipersiapkan diawal kegiatan pengumpulan data
- c. Diperlukan tim pengelola data dan informasi di masing-masing Kabupaten/Kota.
- d. Selain mengisi data secara manual dalam format table, BPBD Kabupaten/Kota juga perlu mengisi data secara online pada server BNPB pada host yang sudah dipersiapkan agar data terkelola secara masala dan cepat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

- Data dan Informasi Kebencanaan disetiap kabupaten/kota sangat penting dalam penyusunan kebijakan PB khususnya kebijakan mitigasi dan pengurangan risiko bencana pencegahan dan kesiapsiagaan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

B. Saran

- Data dan informasi kebencanaan hendaknya menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan program dan kegiatan Penanggulangan bencana, termasuk penataan ruang.
- Diharapkan Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan ini dijadikan prioritas di BPBD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta personel yang memadai.

LAMPIRAN FOTO

